

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Fungsi lembaga keuangan perbankan itu sendiri yaitu sebagai intermediasi antara pemilik uang (penyimpan dana) dan menyalurkannya kepada para pengusaha. Oleh karena itu, perbankan memiliki tiga kegiatan utama yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan jasa/layanan.³ Selain sebagai intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Cet. ke-2, hlm. 4.

² *Ibid.*

³ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonoi Syariah: Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 31.

sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁴

Penghimpunan dana dalam perbankan syariah berasal dari dua sumber yaitu: 1) modal yang berasal dari pendiri dan/atau pemegang saham; 2) simpanan masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Deposito dilakukan dengan akad *mudharabah*; giro dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*/titipan; dan tabungan dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* atau *wadi'ah*.⁵

Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang merupakan salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Jabar Banten Syariah yang berada di Kota Bandung yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seperti bank syariah lainnya, Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang menawarkan beberapa macam produk diantaranya: produk penghimpunan dana (simpanan tabungan), produk pembiayaan, dan produk jasa. Dalam produk penghimpunan dana antara lain Tabungan iB *Maslahah*, Giro iB *Maslahah*, dan Deposito iB *Maslahah*.

Tabungan iB *Maslahah* yang ditawarkan Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang terdapat produk tabungan *Lock & Win* dan *TASEDO*. Tabungan *Lock & Win* merupakan program pemberian hadiah untuk nasabah perorangan yang menempatkan dana *fresh fund* pada produk tabungan iB *Maslahah* dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Tabungan *Lock & Win* yaitu tabungan yang dikunci selama jangka waktu perjanjian keikutsertaan program *Lock & Win* dan

⁴ Perbankan Syariah menurut UU No.21 tahun 2008 pasal 4.

⁵ Jaih Mubarak, *Loc. Cit.*

akan mendapatkan hadiah langsung berupa barang tanpa diundi dengan minimal dana yang diendapkan sebesar Rp10.000.000.⁶

Hadiah yang diperoleh nasabah diperjanjikan oleh pihak bank dan ditentukan dari lamanya jangka waktu dan nominal dana yang diendapkan. Semakin besar nominal yang diendapkan oleh nasabah maka akan semakin besar pula hadiah yang akan diperoleh. Nasabah juga bisa menawar hadiah yang akan diterimanya atau bisa memilih sendiri hadiah yang diinginkan asalkan sesuai dengan nominal hadiah yang telah diperhitungkan oleh pihak bank.

Apabila tabungan diambil sebelum jangka waktu perjanjian, maka hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan dalam keadaan baru atau bisa dengan uang seharga barang tersebut dan nasabah akan dikenakan biaya pembatalan program berdasarkan nilai hadiah dari sisa jangka waktu pengendapan.

Tujuan pihak bank dalam memberikan hadiah tersebut yaitu untuk memberikan *reward* kepada nasabah berprestasi yang telah mengikuti program *Lock & Win* dan telah memenuhi syarat-syarat keikutsertaan program yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Pemberian hadiah kepada nasabah dalam program *Lock & Win*, Bank Jabar Banten Syariah memiliki regulasi/peraturan yang berbeda pada tahun 2014 dan tahun 2017 sesuai peraturan yang diterapkan oleh kantor pusat. Perubahan tersebut tertuang dalam *Standard Operational Procedure* (SOP), diantaranya:

- a. Dana minimal yang diendapkan;
- b. Biaya (denda) pembatalan program;

⁶ Hasil wawancara dengan ibu Risa Afianti selaku Account Officer Funding, pada tanggal 18 Januari 2017.

- c. Penentuan hadiah yang diberikan;
- d. Penentuan pajak dalam hadiah yang diberikan;
- e. Pengembalian hadiah apabila nasabah *wanprestasi*.

Pada dasarnya, setiap bank syariah maupun bank konvensional memiliki peraturan yang berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan kebijakan dari masing-masing lembaga keuangan perbankan sesuai dengan standar operasionalnya. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menjadikan lembaga tersebut lebih baik dari pada sebelumnya. Begitupun dalam pemberian hadiah dalam program *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang yang memiliki peraturan berbeda dari waktu ke waktu.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang memiliki program *Lock & Win* tabungan yaitu suatu program dimana tabungan dikunci selama jangka waktu yang telah disepakati dan akan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Hadiah tersebut di perjanjikan oleh pihak bank. Dalam pemberian hadiah program *Lock & Win*, Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang memiliki regulasi yang berbeda dari waktu ke waktu sesuai peraturan yang diterapkan oleh kantor pusat. Hal ini dibolehkan asalkan sesuai dengan aturan/hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi pemberian hadiah dalam program *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan tahun 2017?

2. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah *wanprestasi* dalam program *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan tahun 2017?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap dinamika regulasi pemberian hadiah kepada nasabah pada program *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan 2017?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui regulasi pemberian hadiah dalam program *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan tahun 2017.
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah *wanprestasi* dalam program *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan tahun 2017.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap dinamika regulasi pemberian hadiah kepada nasabah pada program *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dibuat baik manfaat teoritis dan praktis adalah:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas. Terutama dalam pelaksanaan pemberian hadiah kepada nasabah dalam program *Lock & Win* tabungan.
- b. Bagi bank yang diteliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan sebagai proses pembelajaran dan dapat bermanfaat sebagai bahan petunjuk atau bahan untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Bagi pihak lain diharapkan sebagai informasi yang dapat dipergunakan untuk tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi, khususnya yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

Nurul Aisyah (2016) judul penelitian “Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Program *Lock and Win* Tabungan dan *Giro iB Masalah* di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikurubuk Tasikmalaya”. Dalam penyerahan hadiah kepada nasabah pihak Bank menggunakan akad hibah *bi syarth*. Syarat-syarat disini merupakan syarat-syarat keikutsertaan program bukan syarat pembatasan barang

yang dihibahkan. Jadi, hibah *bi syarth* dalam program *Lock and Win* diperbolehkan.⁷

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemberian hadiah *Lock & Win* di Bank Jabar Banten Syariah. Perbedaannya, skripsi ini meneliti akad dalam pemberian hadiah yaitu menggunakan akad *hibah bi syarth*.

Mila Syamrotul Huda (2016) judul penelitian “Implementasi program BSM pesta hadiah pada produk tabungan BSM di BSM KC Buah Batu”. Pada program BSM pesta hadiah ini, hadiah yang diberikan yaitu berupa uang tunai sedangkan menurut Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa hadiah yang diberikan kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Dengan demikian pelaksanaan program BSM pesta hadiah ini adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.⁸

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pemberian hadiah oleh LKS kepada nasabah. Perbedaannya, skripsi ini meneliti pemberian hadiah yang berupa uang tunai di BSM KC Buah Batu.

Tri Waritu (2011), judul penelitian “Pemberian Hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)”. Dalam penelitian ini, bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan program tersebut sesuai dengan

⁷ Nurul Aisyah, *Pelaksanaan Pemberian Hadiah pada Program Lock and Win Tabungan dan Giro iB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Cikurubuk Tasikmalaya*, (Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

⁸ Mila Syamrotul Huda, *Implementasi program BSM pesta hadiah pada produk tabungan BSM di BSM KC Buah Batu*, (Skripsi Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qhardhawi yang dipertegas dengan perbuatan Rasulullah SAW, sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat, maka pelaksanaan program tersebut diperbolehkan oleh syara'.⁹

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas pemberian hadiah kepada nasabah. Perbedaannya, skripsi ini meneliti tentang pendapat Yusuf Qhardhawi mengenai pemberian hadiah.

Mohamad Rohli (2011) judul penelitian “Pelaksanaan Program Undian Berhadiah pada Bank Syariah: Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah”. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa undian telah diatur dengan baik dalam tataran hukum formal maupun dalam tataran hukum normatif (syariah). Secara umum BSM telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah mengenai undian hadiah.¹⁰

Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai pemberian hadiah kepada nasabah. Perbedaannya, skripsi ini meneliti peraturan hukum formal dan hukum normatif mengenai undian dalam pemberian hadiah.

F. Kerangka Pemikiran

Hadiah dalam Islam kerap kali diserupakan dengan hibah dan sedekah karena dianggap memiliki makna yang sangat berdekatan yang membedakannya

⁹Tri Warita, *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)*, (Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011). Diakses melalui repository.uin-suska.ac.id/1975/1/2011_2011132.pdf pada tanggal 11 November 2017, pukul. 08.12 WIB.

¹⁰Mohamad Rohli, *Pelaksanaan Program Undian Berhadiah pada Bank Syariah, Kajian Hukum Pelaksanaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelegar Hadiah*, (Skripsi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum kegiatan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011). Diakses melalui lib.ui.ac.id/file?file=digital/20233910-S265-Pelaksanaan%20program.pdf pada tanggal 17 November 2017, pukul. 08.13 WIB.

hanya dalam tujuannya. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika seseorang tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah. Jika tidak untuk keduanya, maka itu adalah hibah. Sedangkan *athiya* adalah pemberian seseorang yang dilakukan jika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.¹¹

Hadiah dalam program *Lock & Win* tabungan diberikan kepada nasabah berprestasi yang telah mengikuti program *Lock & Win* berdasarkan akad *mudharabah*.

Menurut Fatwa DSN-MUI, tabungan *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan pihak *mudharib* bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak.¹²

Mudharabah sebagai salah satu produk bank syariah, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam, maka sudah tentu harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalah sebagai berikut:

1. Asas *tabaddulul manafi*, yaitu segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fikih Islam* 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 523.

¹² Fatwa DSN-MUI Nomor 86 tentang hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

2. Asas pemerataan, yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang saja.
3. Asas '*an taradin*, yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang bermuamalat.
4. Asas '*adamul gharar*, yaitu menghilangkan *gharar* (ketidakpastian) yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
5. Asas '*al-birr wa al-taqwa*, yaitu prinsip saling tolong menolong antar sesama manusia.
6. Asas '*musyarakah*, yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.¹³

Selain harus sesuai dengan asas-asas muamalah, juga harus memperhatikan akad-akad dalam bermuamalah. Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu عقد – يعقد – عقدا yang berarti ikatan atau perjanjian. Kata ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang-orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الربط) dan kesepakatan (الاتفاق).¹⁴

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan syariat yang ditetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT Lathifah Press, 2004), hlm. 113-114.

¹⁴ Ahmad Warson Al-Manawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pesantren Karafyak, Tth), hlm. 1023.

khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah, akad diartikan sebagai perjanjian, kontrak, transaksi, pertalian *ijab* dengan *qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objeknya.¹⁵

Berkaitan dengan perjanjian, setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam al-Quran, yaitu kata *al-‘aqdu* (akad) dan kata *al-‘ahdu*. al-Qur’an memakai kata *al-‘aqdu* dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata *al-‘ahdu* dalam al-Qur’an diartikan dengan masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.¹⁶

Akad (ikatan, keputusan, perjanjian, transaksi atau penguatan) dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan).

Menurut Ghufron A. Mas’adi dalam Gemala Dewi dkk., pengertian akad secara bahasa adalah ikatan/mengikat. Ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya

¹⁵ Muhammad Sholehuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 3.

¹⁶ Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), hlm. 9.

pada yang lainnya sehingga keduanya terhubung dan menjadi seperti seutas tali yang sama.¹⁷

Menurut ulama fiqih, syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad ada 5 yaitu, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara', ada manfaatnya, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara'.¹⁸ Karena itulah ulama fiqih menetapkan apabila akad yang telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT, menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹⁹

Kaitannya dengan praktik di perbankan syariah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri dapat digolongkan menjadi 2 klasifikasi, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*.²⁰

¹⁷ Gembala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 45.

¹⁸ Sohara Sahrani dan Ru'fah Abdullah,, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 45-46.

¹⁹ Ahmad Mustaf, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 77.

²⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 28-29.

1. Akad *Tabarru* (*gratuitous contract*)

Tabarru berasal dari bahasa arab yaitu *birr* yang artinya kebaikan. Akad *tabarru* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Pada hakikatnya transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.²¹ Akad *tabarru* merupakan akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT, semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersial. Dalam akad *tabarru*, pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mensyaratkan apapun kepada pihak lainnya.

Tiga bentuk umum akad *tabarru*, yaitu:

a. Meminjamkan uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Meminjamkan uang tanpa mensyaratkan apapun selain pinjaman tersebut dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam fiqh muamalah hal ini disebut dengan *qardh*.
- 2) Meminjamkan uang dengan mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Meminjamkan uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman ini disebut dengan *hiwalah*.

²¹ Fauzan Arif, *Prinsip Tabarru "Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah*, dalam Jurnal Al-Amwal Volume 8, No. 2 Tahun 2016, Kuningan, hlm. 404. Diakses pada tanggal 16 November 2017, pukul 17.23 WIB

b. Meminjamkan jasa (*lending yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Ada 3 jenis *wakalah*, yaitu:
 - a) *Wakalah al mutlaqah* yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa ada batasan waktu dan untuk segala urusan.
 - b) *Wakalah al muqayyadah* yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
 - c) *Wakalah al amah* yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al mutlaqah*.
- 2) *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta/modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. Wadi'ah terdiri dari 2 jenis yaitu
 - a) *Wadi'ah yad amanah*, yaitu harta/modal yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan (*wadi'*).
 - b) *Wadi'ah yad dhamanah*, yaitu harta/modal yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 3) *Kafalah* adalah mengalihkan tanggungjawab seseorang kepada orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggungjawab atas tanggungjawab seseorang dalam

pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang. *Kafalah* terbagi 3 jenis yaitu:

- a) *Kafalah bin nafs*, yaitu jaminan dari diri si penjamin (*personal guarantee*).
- b) *Kafalah bil maal*, yaitu jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang.
- c) *Kafalah muallaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu.

c. Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk ke dalam bentuk akad ini yaitu akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah.²²

- 1) Hibah yaitu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain dengan maksud berbuat kebaikan diwaktu dia masih hidup tanpa adanya imbalan.²³
- 2) Wakaf yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.
- 3) Shadaqah yaitu pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan diberikan kepada orang

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 66-68.

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), edisi 1 cetakan ke-2, hlm. 73.

yang sangat membutuhkan, tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.²⁴

- 4) Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, hadiah merupakan bukti cinta dan kejernihan hati, di dalam hadiah terdapat nilai penghargaan dan penghormatan.

Begitu akad *tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* yakni akad komersial kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Sebaliknya jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melaksanakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad *tabarru* ini merupakan akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial bank. Bank syariah sebagai lembaga keuangan bertujuan untuk mendapatkan laba. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru* sering sangat vital dalam transaksi komersial, karena akad *tabarru* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

2. Akad *Tijarah/muawadah (compensational contract)*

Akad *tijarah* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Contoh

²⁴ Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*, (Depok: Gema Insani, 2005), hlm. 15.

akad *tijarah* akad-akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni:

a. *Natural Certainty Contract (NCC)*

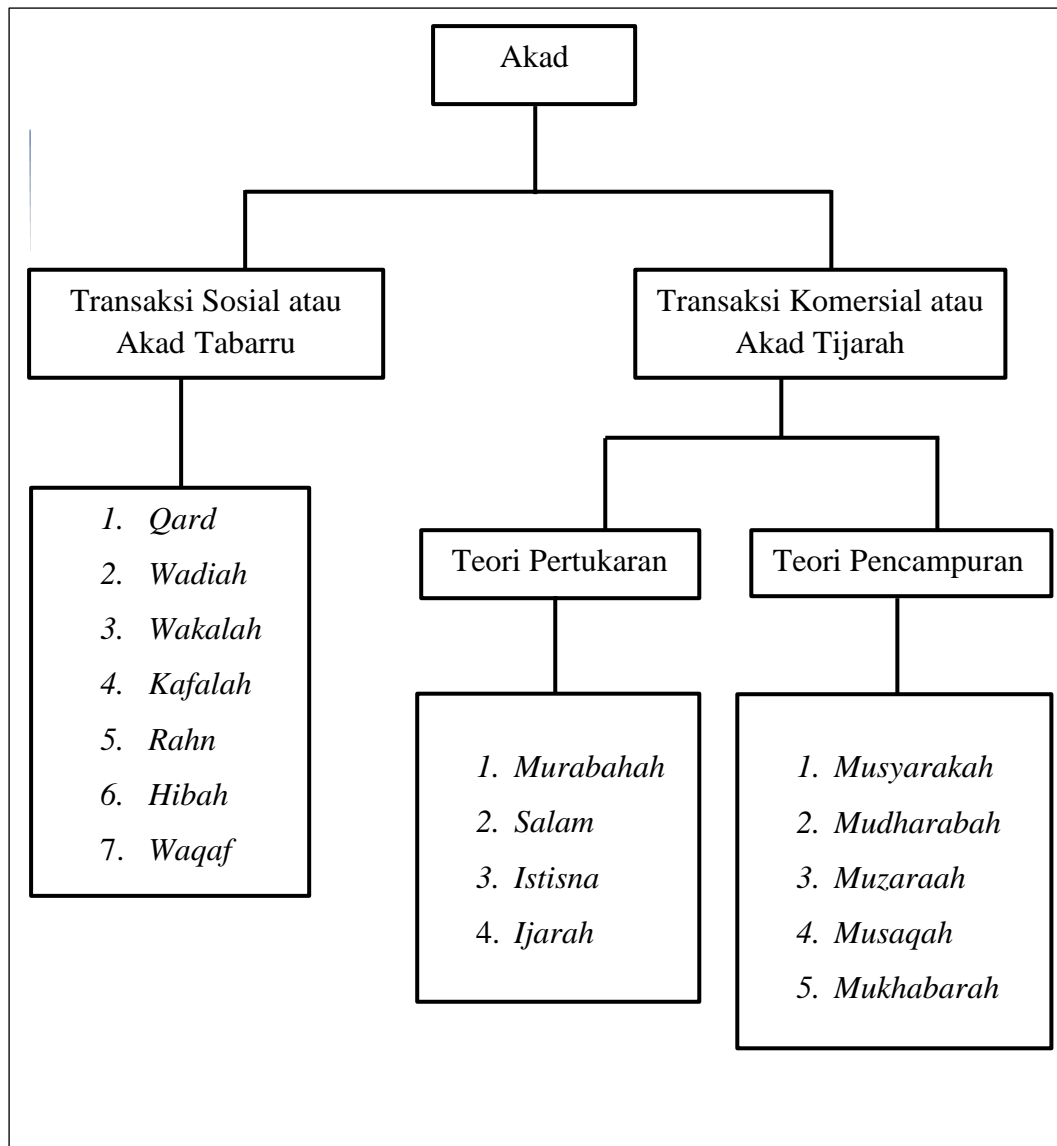
Natural Certainty Contract (NCC) yaitu suatu akad dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah-mengupah dan sewa-menyewa.

b. *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Natural Uncertainty Contract (NUC) yaitu suatu akad dimana para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam akad ini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investatsi secara *sunnutullah (by their nature)* tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh transaksi ini adalah *musyarakah, muzara'ah, musaqah, mukhabarah*.²⁵

²⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Op. Cit*, hlm. 70-75.

Gambar 1.1 Skema Akad-akad dalam Bank Syariah²⁶



Dibidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kaidah fiqh yang menerangkan tentang hukum asal muamalah yang sering digunakan yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

²⁶ Ibid, hlm. 71.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁷

Maksud kaidah ini bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratatan, tipuan, judi dan riba.²⁸

Identifikasi penyebab terlarangnya sebuah transaksi disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:²⁹

a. Haram Dzatnya (*Haram Li-Dzatihi*)

Transaksi karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras haram, walaupun akad jual belinya sah.

b. Haram selain Dzatnya (*Haram Li-Ghairihi*)

1) Melanggar prinsip *An Taradin Minkum*.

2) Melanggar prinsip *La Tazhlimun wa la Tuzhlamun* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi), yaitu *Gharar* (*Taghrir*, *Ihtikar*, *Riba*, *Maysir* dan *Risywah* (suap menyuap)).

c. Tidak sah/lengkap akadnya

1) Rukun dan Syarat tidak terpenuhi;

2) Terjadi *Ta'alluq* (dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad

1 tergantung akad 2)

²⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah (Dasar-Dasar Awal)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 25.

²⁸ Acep Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet ke-4, hlm. 130.

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam, Op. Cit.*, hlm. 30-49.

3) Terjadi “two in one”

Kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan.

Hadiah termasuk ke dalam akad *tabarru* sebagaimana tiga bentuk umum akad *tabarru* yang salah satunya adalah memberikan sesuatu (*giving something*). Begitu akad *tabarru* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah* kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampai yang berbeda.³⁰ Metode penelitian ini membandingkan persamaan dan perbedaan mengenai dinamika regulasi pemberian hadiah kepada nasabah pada program *Look & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang pada tahun 2014 dan 2017 yang kemudian menganalisis data-data

³⁰ Sugiyon, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), hlm. 29.

yang diperoleh sesuai hukum ekonomi syariah sebagai rujukan melalui pendekatan studi kasus.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam mendukung penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama dari suatu penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak bank, yang diangkat dalam penelitian ini dan dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dari pihak-pihak terkait.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang menunjang data primer. Data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, dokumen tertulis dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dianalisis dan ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi, terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video yaitu mengenai pelaksanaan pemberian hadiah kepada nasabah pada

program *Look & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara untuk mendapatkan data, diantaranya:

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.³¹ Tanya jawab tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan langsung dengan Divisi Dana (*funding*) Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang pada tanggal 18 Januari 2017 dan 22 Januari 2018.

b. Studi Pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, seperti buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau

³¹ Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

catatan-catatan yang tersimpan baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.³²

5. Analisis Data

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang dan sumber data lainnya, sehingga penulis dapat menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun kedalam satuan-satuan menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.



u
in
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Penanganan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986), hlm. 231.